

ABSTRAK

DAMPAK KEBIJAKAN *AFFIRMATIVE ACTION* CALON LEGISLATIF PEREMPUAN TERHADAP KUALITAS REKRUTMEN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2013

Oleh

RIZKI PRIANGGI KUSUMA

Kebijakan *affirmative action* untuk mempertegas kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilu 2014 dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Kurangnya kaderisasi membuat partai politik harus bekerja ekstra keras untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Jika tidak terpenuhi, ancaman diskualifikasi akan diberlakukan bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan pada suatu daerah pemilihan. Kemudian yang terjadi adalah penurunan syarat-syarat kualitas yang sudah distandarisasi oleh setiap partai politik agar perempuan dapat menjadi calon legislatif yang hanya sekedar memenuhi syarat administratif.

Berawal dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan *affirmative action* kuota 30% calon legislatif perempuan terhadap kualitas rekrutmen calon legislatif perempuan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan

dengan cara wawancara secara mendalam terhadap beberapa informan yang representatif dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian kualitas proses rekrutmen calon legislatif perempuan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu yang dianalisis melalui tipe rekrutmen *partisan*, *compartmentalization*, *immediate survival*, dan *civil service reform* menunjukkan tipe rekrutmen *immediate survival* sangat dominan dalam proses rekrutmen calon legislatif perempuan yang dilakukan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu. Dominasi tipe rekrutmen *immediate survival* muncul ketika partai politik dihadapi dengan minimnya kader perempuan tetapi harus memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Akibatnya partai politik merekrut calon legislatif perempuan tanpa mempertimbangkan kemampuan dan hanya dijadikan pelengkap untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Selain itu, calon legislatif perempuan yang direkrut secara *immediate survival* tidak mampu memenuhi kriteria Kingsley yang dijadikan indikator calon legislatif yang berkualitas. Selain berdampak terhadap kualitas rekrutmen, kebijakan *affirmative action* kuota 30% keterwakilan perempuan juga berdampak pada beberapa hal, seperti pengaruhnya kepada persoalan perempuan, berdampak kepada laki-laki, berdampak dimasa mendatang, dan dampak tidak langsung seperti menimbulkan politik gender oligarki.

Kata kunci: dampak kebijakan, *affirmative action*, kuota 30% keterwakilan perempuan, kualitas rekrutmen.